

**PENGUKURAN KESENJANGAN DIGITAL
DI DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

TESIS



Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapatkan
gelar Magister Chief Information Officer

Oleh:
SYARIF HIDAYATULLAH
NIM. 1108470

**PROGRAM MAGISTER CHIEF INFORMATION OFFICER
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

Measurement of Digital Divide in the Plantation and Animal Husbandry Unit of Tapanuli Selatan Regency

ABSTRACT

The rapid progress of informational technology and its potential advantages at the time give the chance of information to be accessed, mined, and used in a huge volume in a fast and accurate way. Incapability in adapting to the information technology advancement can create a digital divide for Indonesia.

The objective of the research is to attain information about the level of digital divide occurring among the public servants (human resources) and the situation of digital divide among the human resources and then compiling strategies to reduce the digital divide among the human resources in government sector. The research is conducted in the Plantation and Animal Husbandry Unit of Tapanuli Selatan Regency. The output of the research is expected to be attributable to disseminating Information and Communication Technology (ICT) in Indonesia. In addition, efforts to reducing the digital divide proposed can help maximize the implementation of e-government program particularly in terms of human resources. It is a description research by applying a quantitative approach, which involves 43 respondents. The research instrument applied refer indicators SIBIS GPS (2002) which is adapted to the scope of research, namely individuals or human resources.

The output of the digital divide (ICT access divide and ICT skills divide) measurement shows the level of digital divide among the human resources approaches a medium digital divide. Meanwhile, the conditions of digital divide according to age, income, and education group give a significant account to the degree of digital divide among the human resources. On the other hand, sex shows less significance to it. According to this study, for the digital divide to be reduced in the Plantation and Animal Husbandry Unit of Tapanuli Selatan Regency, it is highly recommended to reduce the digital divide, in line with implementation of e-government program, by applying strategies comprising of two steps, namely giving motivation in using ICT and providing ICT training for the decision makers and public servants.

Key words: digital divide, human resources, ICT, e-government, SIBIS GPS

ABSTRAK

Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat saat ini serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi informasi akan membawa Indonesia ke dalam jurang kesenjangan digital (*digital divide*).

Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan informasi mengenai tingkat kesenjangan digital yang terjadi antar Sumber Daya Manusia (SDM) dan kondisi kesenjangan digital yang terjadi antar SDM, kemudian menyusun strategi untuk mengurangi kesenjangan digital antar SDM dalam pemerintahan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Selatan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pemerataan TIK di Indonesia. Selanjutnya upaya pengurangan kesenjangan digital yang diusulkan dapat membantu memaksimalkan penerapan *e-government* terutama dari sisi SDM. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan jumlah subjek penelitian sebanyak 43 orang. Instrumen penelitian yang dibuat mengacu pada indikator SIBIS GPS (2002) dengan modifikasi sesuai dengan lingkup penelitian yaitu individu atau SDM.

Hasil dari pengukuran kesenjangan digital yang telah dilakukan dalam penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan digital (kesenjangan akses TIK dan kesenjangan kemampuan TIK) antar SDM berada pada kategori sedang, sementara kondisi kesenjangan digital berdasarkan faktor kelompok usia, penghasilan, pendidikan pengaruh yang cukup besar terhadap tingkat kesenjangan digital antar SDM, sementara jenis kelamin tidak cukup signifikan memberikan pengaruh terhadap tingkat kesenjangan digital. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka untuk mengurangi kesenjangan digital antar SDM di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tapanuli Selatan diusulkan strategi pengurangan kesenjangan digital bagi pegawai pemerintah sejalan dengan penerapan *e-government* yang terdiri dari dua bagian yaitu pemberian motivasi dalam menggunakan TIK dan pelatihan TIK terhadap pembuat keputusan dan pegawai.

Kata-Kata Kunci: Kesenjangan Digital, SDM, e-government, SIBIS GPS

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Mahasiswa : Syarif Hidayatullah
NIM : 1108470
Program Studi : Magister (S2) CIO

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Ganefri, M.Pd, Ph.D
NIP. 19631217 198903 1 003

Dr. M. Giatman, MSIE
NIP.

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Padang

Ketua Pascasarjana FT,

Drs. Ganefri, M.Pd, Ph.D
NIP. 19631217 198903 1 003

Prof. Dr. Nizwardi Jalinus, M.Ed
NIP. 19520822 197710 1 001

PERSETUJUAN KOMISI
UJIAN TESIS MAGISTER CHIEF INFORMATION OFFICER

Dipertahankan di depan Panitia Penguji Tesis
Program Magister Chief Information Officer (CIO)
Program Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang
Tanggal : 10 April 2013

No.	Nama	Tanda Tangan
1	<u>Drs. Ganefri, M.Pd, Ph.D</u> (Ketua/Pembimbing I/Penguji)	_____
2	<u>Dr. M. Giatman, MSIE</u> (Sekretaris/Pembimbing II/Penguji)	_____
3	<u>Drs. Syahril ST, M.Eng, Ph.D</u> (Anggota)	_____
4	<u>Muhammad Adri, S.Pd, MT</u> (Anggota)	_____
5	<u>Donny Novaliendry, M.Kom</u> (Anggota)	_____

Padang, 10 April 2013
Program Magister Chief Information Officer (CIO)
Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang
Ketua,

Dr. Fahmi Rizal, M.Pd, MT
NIP. 19591204 198503 1 004

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis dengan judul “Pengukuran Kesenjangan Digital Di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Selatan” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni dari gagasan, penilaian dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing;
3. Di dalam tulisan ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, Maret 2013

Saya yang menyatakan,

Syarif Hidayatullah
NIM. 1108470

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Dalam penelitian ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika khususnya Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang telah memberikan biaya pendidikan sampai selesainya penulisan tesis ini;
2. Drs. Ganefri, M.Pd, Ph.D dan Dr. M. Giatman, MSIE selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membantu penulis dalam memberikan arahan dan dukungan sehingga penelitian tesis ini dapat diselesaikan;
3. Drs. Syahril ST, M.Eng, Ph.D, Muhammad Adri, S.Pd, MT dan Donny Novaliendry, M.Kom selaku Kontributor, Penguji I dan Penguji II yang memberikan saran dan kritik demi kesempurnaan tesis ini;
4. Kepala Dinas Pekebunan dan Peternakan Kab. Tapanuli Selatan beserta seluruh staf dan jajarannya yang membantu serta bersedia menjadi responden penelitian ini;
5. Ayahanda Guru Mursyid Thariqat Naqsyabandiyah Yayasan Jabal Qubis Tanjung Morawa Medan “ **Saidi Ghazali An-Naqsyabandi**” atas bimbingan Ruhaniyahnya;
6. Bapak (Alm.), Ibu, Mertua, Istri tercinta Devi Irahmadani Gianta, SH dan putriku tersayang Naura Assyifa Syarif serta seluruh keluarga dan teman-teman mahasiswa Program Magister *Chief Information Officer* (CIO) Angkatan 2011 yang telah berpartisipasi memberikan bantuan baik moril maupun materil, dan doanya kepada penulis dalam penyelesaian penelitian ini.

Peneliti berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan ke depan.

Padang, April 2013
Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN AKHIR TESIS	iv
PERSETUJUAN KOMISI	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Pembatasan Masalah	9
D. Perumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	12
1. Definisi Kesenjangan Digital	12
2. Konsep Kesenjangan Digital	14

3. Kesenjangan Digital di Indonesia	18
4. Penyebab Terjadinya Kesenjangan Digital	25
5. <i>Digital Divide</i> dan Kaitannya dengan <i>e-Government</i>	27
6. E-Government	29
7. Definisi <i>Digital Immigrant</i> dan <i>Digital Natives</i>	35
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi	39
9. Metode Pengukuran Kesenjangan Digital	41
10. Profil Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tapsel	46
B. Kajian Penelitian Yang Relevan	53
C. Kerangka Konseptual	55
D. Pertanyaan Penelitian	56

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	57
B. Definisi Operasional	58
C. Populasi dan Sampel	58
D. Pengembangan Instrumen	59
E. Teknik Pengumpulan Data	61
F. Teknik Analisis Data	62

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data	67
B. Jawaban Pertanyaan Penelitian	77
C. Pembahasan	85
1. Tingkat Kesenjangan Digital dari Aspek Akses TIK	85
2. Tingkat Kesenjangan Digital dari Aspek Kemampuan TIK	89

3. Tingkat Kesenjangan Digital dari Aspek <i>Demographic</i>	90
4. Strategi Pengurangan Kesenjangan Digital	95

BAB V. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan	102
B. Implikasi	103
C. Saran	104

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Komposisi SDM Berdasarkan Latar Pendidikan	6
2. Telekomunikasi dan Broadband di Asia	20
3. Kelompok Beresiko yang menjadi fokus DIDIX	42
4. Perbandingan Metode Pengukuran DIDIX dan SIBIS	45
5. Data Teknologi yang ada saat ini	50
6. Strategi dan Program Kerja	52
7. Distribusi Sampel	59
8. Instrumen Pengukuran Kesenjangan Digital	60
9. Ringkasan Uji Validitas Kuisisioner	66
10. Ringkasan Uji Reliabilitas Kuisisioner	67
11. Data Penggunaan Komputer	68
12. Data Kepemilikan Komputer	70
13. Data Penggunaan Internet	72
14. Data Kepemilikan Akses Internet di Rumah	74
15. Data Kemampuan TIK	76
16. Data Kesenjangan Akses TIK	78
17. Data Kesenjangan Kemampuan TIK	81
18. Kurikulum Pelatihan untuk Pembuat Keputusan	98
19. Kurikulum Pelatihan untuk Pegawai tidak Memiliki kemampuan TIK .	100
20. Kurikulum Pelatihan untuk Pegawai Memiliki Kemampuan TIK	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Konsep <i>E-Government</i>	32
2. Kerangka Konseptual Penelitian.....	55
3. Diagram Indeks Kesenjangan Digital.....	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Uji Validitas dan Reliabilitas Kesenjangan Digital	109
2. Frekuensi Data Kesenjangan Digital	112
3. Tabulasi Data Hasil Penelitian	115
4. Data Penggunaan Komputer	116
5. Data Kepemilikan Komputer	117
6. Data Penggunaan Internet	118
7. Data Kepemilikan Akses Internet di Rumah	119
8. Data Kemampuan TIK	120
9. Kuisisioner Penelitian	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sektor industri yang sedang berkembang pesat saat ini adalah sektor industri di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi. Berbagai bidang kehidupan masyarakat di Indonesia mulai terkena dampak global di bidang kemajuan teknologi terkini. Tidak bisa dipungkiri jika setiap individu mulai berlomba untuk mendapatkan akses yang murah, cepat, dan efisien.

Hal di atas didukung dengan harga komputer, laptop, handphone kaya fitur, modem internet, serta layanan internet semakin murah di tengah kondisi masyarakat yang haus akan teknologi. Teknologi informasi dan telekomunikasi, keduanya saling mendukung dan melengkapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini. Namun, kondisi ini memunculkan masalah baru ditingkat pemerataan penggunaan layanan teknologi informasi dan komunikasi yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Euforia penggunaan layanan tersebut masih dirasakan hanya di sebagian penjuru kota-kota besar di Indonesia, hal inilah yang sebenarnya memunculkan istilah kesenjangan digital (Sembiring, 2011).

Kesenjangan digital mengacu pada kesenjangan atau jurang yang menganga di antara mereka yang dapat mengakses teknologi informasi (TI) dan mereka yang tidak dapat melakukannya. Kesenjangan digital bisa berupa kesenjangan yang bersifat fisik (tidak mempunyai akses terhadap komputer dan perangkat TI lain) atau kesenjangan yang bersifat kemampuan dalam menggunakan TIK yang diperlukan untuk dapat berperan serta sebagai warga digital (Choi, 2004). Jika pembagian mengarah ke kelompok, maka kesenjangan digital dapat dikaitkan dengan perbedaan sosial-ekonomi, generasi, atau geografis (Chen dan Wellman, 2003). Sejalan dengan berkembangnya dan makin tidak terpisahkannya internet dengan TI, maka kesenjangan digital mencakup juga ketidakseimbangan akses terhadap dunia maya. Jadi, kesenjangan digital sebenarnya mencerminkan beragam

kesenjangan dalam pemanfaatan telematika dan akibat perbedaan pemanfaatannya dalam suatu negara dan/atau antar Negara. Kesenjangan digital menjadi perhatian penting di berbagai negara untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di bidang teknologi informasi, salah satunya yaitu di Indonesia.

Kondisi kesenjangan digital di Indonesia digambarkan oleh data yang dilaporkan UNDP (*United Nations Development Programme*) dalam Himpunan Hasil Penelitian Kementerian Komunikasi dan Informatika Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) tahun 2005-2008, dimana Indonesia pada tahun 2005 berada pada posisi 51 dari 104 negara dalam indeks kesiapan jaringan (*Network Readiness Index*) dan berada pada urutan 110 dari 177 Negara dalam hal Indeks Kualitas SDM (*Human Development Index*) yang jauh lebih rendah dibandingkan Negara Malaysia (rangking 61). Fakta lain yang menunjukkan Indonesia masih mengalami kesenjangan digital adalah data pada tahun 2010, dimana Indonesia berada pada peringkat 65 dengan skor 3.60 dari skala 10 untuk indikator kemampuan memanfaatkan TIK dalam pembangunan ekonomi (*The Economist Intelligence Unit*, 2010), sementara data dari *Internet World Stats* (2011), menunjukkan jumlah pengguna internet di Indonesia sebesar 55 juta jiwa dengan persen penetrasi 22,4% dari populasi penduduk Indonesia yang hampir 250 juta jiwa.

Masalah kesenjangan digital di Indonesia sebenarnya banyak dihadapi oleh masyarakat yang hidup di daerah terpencil dengan di perkotaan. Indonesia merupakan negara yang memiliki beribu-ribu pulau yang menyulitkan penyebaran informasi dengan cepat. Padahal, pada saat ini informasi merupakan salah satu aset yang memiliki peranan penting dalam seluruh sendi kehidupan (Faruqi, 2007).

Masalah di atas diperkuat oleh Sembiring (2011) yang menyatakan bahwa, Indonesia masih menghadapi kesenjangan digital antara pusat dan daerah. Selain itu, saat ini layanan informasi di Indonesia juga masih lemah dan minimnya informasi yang bersifat edukatif dengan banyaknya tayangan

yang belum mencerdaskan. Menurut beliau, persoalan teknologi informasi yang dihadapi bangsa Indonesia berbeda dengan negara lain, terutama terkait kondisi geografis negeri ini yang berupa kepulauan. Kondisi itu menyebabkan akses informasi belum mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan. Padahal seharusnya TIK dapat memberikan peranannya, yaitu menghilangkan penghalang geografis dan mendukung pemerataan pembangunan di setiap daerah. Apabila Indonesia tidak memiliki perhatian khusus terhadap TIK, Indonesia akan tertinggal dibandingkan negara-negara lain (Faruqi, 2007).

Salah satu program pemerintah dalam mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat informasi sebagai upaya mengurangi kesenjangan digital adalah dengan mengembangkan *e-Government* yaitu penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien (Inpres, 2003). Penerapan *e-Government* akan membantu pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan kepada masyarakat. Beberapa bentuk penerapan *e-Government* yang ada di Indonesia saat ini masih berupa layanan informasi melalui situs web, antara lain situs pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan departemen pemerintah (Departemen Dalam Negeri, 2007).

Pemerintahan Daerah Kab. Tapanuli Selatan sebagai salah satu pemerintahan daerah di Indonesia, memiliki peluang yang cukup besar dalam pembangunan, namun walaupun demikian didalam perspektif pembangunan masih sangat memerlukan upaya-upaya yang signifikan untuk mengakselerasi laju pembangunan dan pelayanan publik TIK. Pelayanan publik berbasis TIK di Pemerintahan Daerah Kab. Tapanuli Selatan sudah mulai dicanangkan pada tahun 2006 dengan diawali pembangunan tower untuk jaringan internet, pemasangan jaringan LAN di semua instansi di Kab. Tapanuli Selatan, namun dalam prosesnya terkendala oleh infrastruktur dan SDM yang ada.

Dalam pembangunan infrastruktur banyak kendala yang dihadapi terutama dari keadaan geografis Kabupaten Tapanuli Selatan yang berada pada 0°58'35' sampai dengan 2°7'33' Lintang Utara dan 98°42'50' sampai dengan 99°34'16' Bujur Timur dengan Luas Daerah 433.470 Ha terdiri dari 14 Kecamatan, 219 Desa/Kelurahan dan dikelilingi oleh bukit-bukit atau lebih dikenal dengan sebutan **Bukit Barisan**, yang mempersulit pembangunan infrastruktur jaringan (Dishubkominfo Kab. Tapsel, 2012).

Faktor lain yang menyebabkan terkendalanya *e-Government* di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah minimnya SDM di pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan yang memiliki latar belakang pendidikan TIK, yaitu hanya berjumlah 26 orang (BKD Kab. Tapanuli Selatan, 2012). Ketersediaan SDM yang dimiliki Kabupaten Tapanuli Selatan juga berpengaruh besar terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah dan berakibat pula terhadap tidak berjalannya *e-Government* di Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, seperti contoh: Pusat Data Elektronik (PDE) ditiadakan, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab. Tapanuli Selatan pada tahun 2011 dipecah menjadi Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tapanuli Selatan dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tapanuli Selatan (Perda No. 13 Tahun 2010).

Padahal Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab. Tapanuli Selatan sebagai salah satu instansi yang melakukan pembinaan terhadap petani dan yang diharapkan mampu mengurangi kesenjangan akses informasi di sektor agribisnis antara petani *on farm* dan pedagang besar, karena pada umumnya petani *on farm* paling menderita dengan margin keuntungan paling kecil, keuntungan paling besar dinikmati oleh pedagang besar yang pada umumnya bukan petani karena mampu mengakses informasi secara cepat, sehingga setiap perubahan yang terjadi dapat segera direspon (Renstra Pusdatin Pertanian 2006-2009).

Kebijakan ini menyebabkan harus dibaginya SDM yang tersedia dan berhentinya pelayanan publik dalam memfasilitasi para pelaku agribisnis pada posisi tawar yang sama melalui pemanfaatan sistem informasi yang mudah diakses oleh para pelaku agrobisnis khususnya di sektor perkebunan dan peternakan dikarenakan SDM yang bertanggung jawab dalam pelayanan tersebut di pertahankan di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tapanuli Selatan sebagai Dinas yang berkuasa penuh membagi SDM yang ada. Dari hasil observasi yang dilakukan penulis, jumlah pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Selatan tercatat sebanyak 43 orang, dengan latar belakang pendidikan seperti pada Tabel 1 (satu) berikut ini:

Tabel 1. Komposisi SDM Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No.	Komposisi SDM berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	S1 Pertanian	14
2	S1 Peternakan	8
3	S1 Ekonomi	2
4	S1 Sosial Politik	3
5	Dokter Hewan	2
6	SLTA/SMA	14

Sumber: Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tapanuli Selatan, Tahun 2011

Berdasarkan komposisi SDM di atas tidak ada satupun SDM yang memiliki latar belakang pendidikan TIK dan semenjak Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tapanuli Selatan berpisah dengan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tapanuli Selatan pada awal tahun 2011 tidak ada perkembangan TIK yang signifikan baik dari sisi infrastruktur maupun kualitas SDM dalam penguasaan TIK hingga saat ini. Hal ini dibuktikan oleh informasi yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pejabat berwenang di Dinas Perkebunan peternakan Kab. Tapanuli Selatan dengan data perkembangan TIK seperti terlampir pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Perkembangan Infrastrukur TIK

Perkembangan TIK	2011	2012 s/d Saat Ini
Infrastruktur		
PC	1 Unit	4 Unit
Laptop	1 Unit	6 Unit
Internet	Tidak Ada	Langganan Speedy
Kebijakan TIK		
Pembentukan tim khusus menangani, membangun dan mengembangkan TIK	Tidak ada	Tidak ada
Pelatihan TIK Kepada SDM		
Pengoperasian Komputer	Tidak ada	Tidak ada
Kemampuan Dasar TIK	Tidak ada	Tidak ada

Kondisi perkembangan TIK yang tidak signifikan seperti yang ditampilkan pada tabel 2 (dua) di atas, terutama dengan tidak adanya kebijakan TIK berhubungan erat dengan tidak adanya pelatihan TIK kepada SDM yang tersedia, hal ini menyebabkan kemampuan TIK yang bervariasi antar SDM di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tapanuli Selatan. Kemampuan TIK yang bervariasi dapat didefinisikan yaitu: ada yang sudah biasa menggunakan komputer tetapi ada pula yang belum biasa, ada yang sudah pernah mengakses internet dan ada pula yang belum. Kemampuan TIK yang bervariasi ini dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan digital dipegawai pemerintah dalam penguasaan TIK (Windasari, 2009).

Kesenjangan digital antar SDM yang diakibatkan kemampuan TIK yang bervariasi ini, menjadi salah satu hambatan pencapaian pelaksanaan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tapanuli Selatan dalam pelayanan publik di sektor perkebunan dan peternakan berbasis TIK antara lain: penyelenggaraan dan pengawasan proses pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk melalui promosi publik, pelayanan publik dalam memfasilitasi para pelaku agribisnis pada posisi tawar yang sama melalui pemanfaatan sistem informasi yang mudah diakses oleh para pelaku agribisnis dan pelayanan informasi statistik perkebunan dan peternakan berbasis teknologi informasi (Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tapanuli Selatan, 2011).

.Berdasarkan pemamparan di atas, SDM menjadi salah satu hambatan pencapaian pelaksanaan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tapanuli Selatan dalam pelayanan publik TIK (*e-Government*) di sektor perkebunan dan peternakan, maka dirasa perlu mengukur tingkat kesenjangan digital antar SDM di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Selatan yang diukur dari aspek kesenjangan akses TIK (indikator: penggunaan komputer, kepemilikan komputer, penggunaan internet dan kepemilikan akses internet di rumah), dari aspek kesenjangan kemampuan TIK yang dikelompokkan berdasarkan aspek *demographic* (usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan penghasilan). Pengukuran dilakukan dengan penyebaran kuesioner berupa pertanyaan tertutup (Ya atau Tidak) untuk dapat diukur tingkat kesenjangan digital antar SDM di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tapanuli Selatan berdasarkan frekuensi jawaban responden. Dari hasil pengukuran ini kemudian disusun strategi yang dapat menjadi bahan rujukan dalam upaya pengurangan kesenjangan digital antar SDM dalam pemerintahan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, terdapat berbagai permasalahan berkaitan dengan penyebab terjadinya kesenjangan digital di Pemerintahan Daerah Kab. Tapanuli Selatan, permasalahan tersebut antara lain:

1. Dalam pembangunan infrastruktur, kendala yang dihadapi terutama dari keadaan geografis Kabupaten Tapanuli Selatan yang dikelilingi oleh bukit-bukit atau lebih dikenal dengan sebutan **Bukit Barisan**, yang mempersulit pembangunan infrastruktur jaringan di Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Minimnya SDM yang berlatar belakang TIK berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah dan berakibat pula terhadap tidak berjalannya *e-Government* di Pemerintahan Daerah Kab. Tapanuli Selatan;
3. Ketersediaan komputer yang kurang dan tidak adanya kebijakan dari pembuat keputusan dalam upaya pemerataan kemampuan TIK seperti

pelaksanaan pelatihan TIK kepada SDM menyebabkan kemampuan TIK yang dimiliki SDM bervariasi;

4. Kesenjangan digital antar SDM yang diakibatkan kemampuan TIK yang bervariasi, menjadi salah satu hambatan pencapaian pelaksanaan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tapanuli Selatan dalam pelayanan publik di sektor perkebunan dan peternakan berbasis TIK.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, permasalahan penelitian ini hanya membatasi masalah berikut:

1. Lokasi penelitian di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tapanuli Selatan;
2. Satuan penelitian adalah individu atau SDM yaitu Pegawai Negeri Sipil;
3. Kesenjangan digital antar SDM diukur dari aspek kesenjangan akses TIK (penggunaan komputer, kepemilikan komputer, penggunaan internet, kepemilikan akses internet di rumah), dari aspek kesenjangan kemampuan TIK dan aspek *demographic* (usia, jenis kelamin, pendidikan, penghasilan).

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka masalah utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesenjangan digital yang terjadi antar SDM di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tapanuli Selatan dilihat dari aspek kesenjangan akses TIK (kepemilikan komputer, penggunaan komputer, penggunaan internet dan kepemilikan akses internet di rumah)?
2. Bagaimana tingkat kesenjangan digital yang terjadi antar SDM di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tapanuli Selatan dilihat dari aspek kesenjangan kemampuan TIK?
3. Bagaimana tingkat kesenjangan digital yang terjadi antar SDM di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tapanuli Selatan dilihat dari aspek *demographic* (umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan penghasilan)?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan informasi mengenai tingkat kesenjangan digital yang terjadi antar SDM di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tapanuli Selatan yang dilihat dari aspek kesenjangan akses TIK (kepemilikan komputer, penggunaan komputer, penggunaan internet dan kepemilikan akses internet di rumah);
2. Mendapatkan informasi mengenai tingkat kesenjangan digital yang terjadi antar SDM di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tapanuli Selatan yang dilihat dari aspek kesenjangan kemampuan TIK;
3. Mendapatkan informasi mengenai tingkat kesenjangan digital yang terjadi antar SDM di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tapanuli Selatan yang dilihat dari aspek faktor *demographic* (umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan penghasilan).

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian secara teoritis dan praktis dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah, dapat dijadikan indikator status kesenjangan digital antar SDM di Dinas lain yang memiliki kondisi yang sama dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tapanuli Selatan;
2. Menjadi bahan evaluasi kemampuan PNS dalam penguasaan TIK saat ini, sehingga timbul upaya untuk pemerataan TIK di pemerintahan dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tapanuli Selatan secara khusus;
3. Strategi pengurangan kesenjangan digital yang disusun dapat dijadikan bahan rujukan dalam penyusunan strategi pengurangan kesenjangan digital di Pemerintahan Kab. Tapanuli Selatan;
4. Bagi Peneliti lain, menjadi bahan rujukan untuk meneliti tingkat kesenjangan digital yang diakibatkan faktor faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang disajikan dalam bentuk deskripsi data, pengujian validitas dan reliabilitas serta pembahasan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kesenjangan digital yang terjadi antar SDM di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Selatan dilihat dari aspek kesenjangan akses TIK berada pada kategori tinggi berdasarkan rata-rata dari sub indikator kesenjangan akses TIK yaitu: penggunaan komputer berada pada kategori sedang, kepemilikan komputer berada pada kategori rendah, penggunaan internet berada pada kategori sedang dan kepemilikan akses internet dirumah berada pada kategori rendah;
2. Tingkat kesenjangan digital yang terjadi antar SDM di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Selatan dilihat dari aspek kesenjangan kemampuan TIK berada pada kategori sedang;
3. Tingkat kesenjangan digital di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tapanuli Selatan jika dilihat dari aspek *demographic* yaitu: pada umur 41-50 tahun dan >50 tahun mengalami kondisi kesenjangan digital yang tinggi, sementara pada usia <30 tahun dan 30-40 tahun mengalami kondisi kesenjangan digital yang rendah. Pada kelompok jenis kelamin, laki laki mengalami kondisi kesenjangan digital yang tinggi sementara wanita mengalami kesenjangan digital yang sedang. Pada kelompok tingkat pendidikan, SMA mengalami kondisi kesenjangan digital yang tinggi sementara pada S1 mengalami kesenjangan digital sedang. Pada kelompok tingkat penghasilan 700 ribu-2 juta dan 4-5 juta mengalami kondisi kesenjangan digital yang tinggi sementara pada penghasilan 2-3 juta dan 3-4 juta mengalami kesenjangan digital yang sedang.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka implikasi dari penelitian ini adalah:

1. Hasil dari pengukuran tingkat kesenjangan digital antar SDM di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tapanuli Selatan yang dilihat dari aspek kesenjangan akses TIK, kemampuan TIK dan *demographic* menjadi evaluasi bagi pembuat keputusan untuk mengupayakan pemerataan penguasaan TIK agar kesenjangan digital dapat dikurangi dengan menyusun strategi pengurangan kesenjangan digital;
2. Strategi pengurangan kesenjangan digital yang diusulkan dalam penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat keputusan untuk menjembatani kesenjangan digital di Pemerinthan Daerah Kab. Tapanuli Selatan.

C. Saran

Terdapat beberapa saran dari hasil penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian selanjutnya dapat meneliti kesenjangan digital dengan menggunakan instrumen yang sama yaitu SIBIS, namun dengan indikator indikator yang lain yang ada di SIBIS sesuai dengan lingkup penelitian;
2. Penelitian ini fokus pada sumber daya manusia sebagai penyebab kesenjangan digital. Sehingga disarankan pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada penyebab kesenjangan digital yang lain seperti infrastruktur, ketersediaan aplikasi, kebijakan manajemen, kekurangan isi/materi dan kurangnya pemanfaatan akan internet itu sendiri;
3. Strategi pengurangan kesenjangan digital yang diusulkan dalam penelitian ini dapat dilakukan ujicoba oleh pembuat keputusan dalam lingkup yang kecil untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam upaya penyusunan strategi pengurangan kesenjangan digital dengan lingkup yang lebih luas.

DAFTAR RUJUKAN

- Aditya, Youdant. 2011. *Analisis Data Penelitian Kuantitatif*. (<http://youdant.wordpress.com/2011/06/13/98/> diakses 25 November 2012).
- Annan, Kofi. 2003. *World Summit on the Information Society*, Geneva, Swiss (<http://www.itu.int/wsis/geneva/coverage/statements/opening/annan.html> di akses tanggal 30 September 2012).
- Badan Kepegawaian Daerah. 2012. *Data Penerimaan PNS formasi 2008 s/d 2010*. Tapanuli Selatan.
- Barzilai, Karline dan Nahon. 2006. *Gaps and Bits: Conceptualizing Measurements for Digital Divide*. The Information School, University of Washington, Seattle, Washington, USA
- Boeree, C.G. 2006. *Personality Theories: Erik Erikson 1902 – 1994*. (<http://webspace.ship.edu/cgboer/erikson.html>, diakses 22 Oktober 2012).
- Camacho, K. 2005 : *Digital Divide, Multicultural Perspectives on Information Societies*, C & F Editions.
- Choi, Heung Suk., Lee, Jae Ung. 2004. *Measuring Digital Divide with Korea Personal Informatization Indices (KPII)*. KADO.
- Departemen Dalam Negeri, 2007. Modul 2: Internet dan E-Government. Diklat Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jakarta.
- Devi, dkk, 2012. *The Digital Divide*. Makalah. Fakultas Teknologi Industri. Universitas Gunadarma. Jakarta.
- Dewan, S. dan Riggins, F.J. 2005. *The Digital Divide: Current and Future Research Directions*, Journal of the Association for Information Systems.
- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. 2012. *Kondisi dan hambatan pelaksanaan e-government di Tapanuli Selatan*. Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kab. Tapanuli Selatan.
- Donny. 2012. Kesenjangan Digital: Krisis atau Mitos?. (<http://iwita.or.id/kesenjangan-digital-krisis-atau-mitos/> diakses 13 januari 2013)
- Economist Intelligence Unit. 2010. *Digital Economy Rankings 2010*. Beyond e-readiness. Written in co-operation with The IBM Institute for Business Value.